

NOTA DINAS

No. 39/ND/XVIII.PEK/01/2025

Kepada Yth. : Tortama KN V
Dari : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau
Tahun 2024
Lampiran : Satu Berkas
Tempat/Tanggal : Pekanbaru, 31 Januari 2025

Menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 320/K/X-XIII.2/2011 terkait Pengelolaan Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK, dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Arif Agus

NIP. 196808291990031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Direktorat PSMK;
2. Inspektorat PIMK.



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Riau**

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME



LAPORAN KINERJA

**BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPK dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai visi dan misi BPK sesuai dengan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Riau 2020 - 2024. Hal ini merupakan pelaksanaan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa setiap satuan kerja Eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja.

BPK Perwakilan Provinsi Riau merupakan salah satu unit Eselon II pada Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V yang memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja kepada para pemangku kepentingan. Laporan Kinerja ini juga merupakan bahan penyusunan Laporan Kinerja AKN V dan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.

Pada Tahun 2024, dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran pencapaian kinerja yang meliputi kegiatan teknis pemeriksaan dan penunjang pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Riau memperoleh skor sebesar **100,19**. Pencapaian skor kinerja ini dikarenakan adanya realisasi atas tiga IKU yang belum sesuai target, namun demikian tiga IKU telah sesuai dengan target dan tujuh IKU lainnya berhasil melebihi target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki agar skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau semakin meningkat kedepannya.

Akhir kata, kami berharap agar laporan ini menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024 dan menjadi referensi untuk melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja pada periode berikutnya sehingga diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan bagi Pimpinan untuk menentukan arah dan pengembangan organisasi .

Pekanbaru, 31 Januari 2025

Kepala Perwakilan,



Arif Agus

NIP. 196808291990031002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	3
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	5
E. Isu-Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	8
B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
BAB IV PENUTUP.....	33
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2. Rencana Aksi Tahun 2024	
3. Berita Acara Validasi TW IV Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Lampiran II yang menyatakan bahwa Pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Sehingga, Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau merupakan bahan penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan Laporan Kinerja Pelaksana BPK.

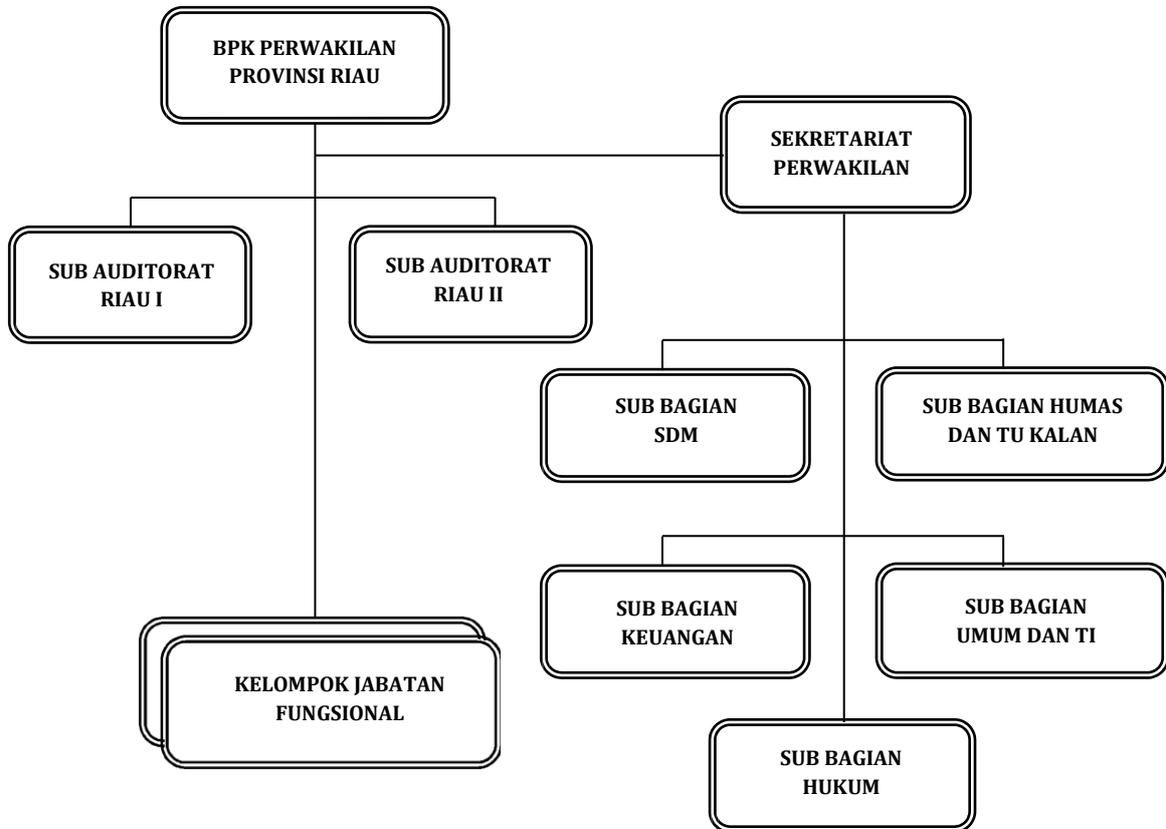
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dimana tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Riau, kota/kabupaten di Provinsi Riau, BUMD, dan lembaga terkait dilingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
6. Pemrolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Riau;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Riau sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Riau terdiri dari:

1. Subauditorat Riau I

Subauditorat Riau I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

2. Subauditorat Riau II

Subauditorat Riau II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

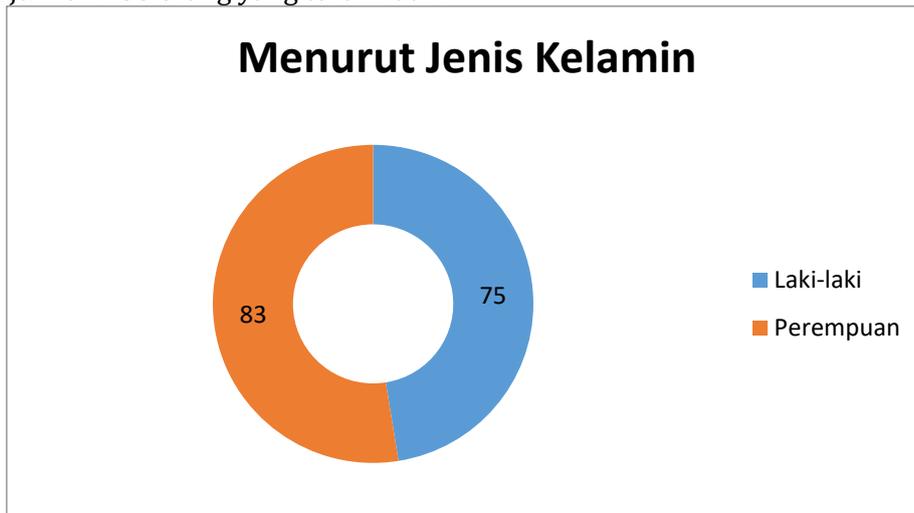
3. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Riau

1. Sumber Daya Manusia

SDM yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Riau per 31 Desember 2024 berjumlah 158 orang yang terdiri dari:



Menurut Golongan/Pangkat	Jumlah
IV/e (Pembina Utama)	0
IV/d (Pembina Utama Madya)	1
IV/c (Pembina Utama Muda)	1
IV/b (Pembina Tingkat I)	4
IV/a (Pembina)	5
Jumlah	11
III/d (Penata Tingkat I)	32
III/c (Penata)	5
III/b (Penata Muda Tingkat I)	42
III/a (Penata Muda)	60
Jumlah	139
II/d (Pengatur Tingkat I)	2

II/c (Pengatur)	5
II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	0
II/a (Pengatur Muda)	0
Jumlah	7
I/d	0
I/c	0
I/b	0
I/a	0
Jumlah	0
PPPK – Ahli Pertama Arsiparis	1
Jumlah	1
Jumlah Total	158

Menurut Jenjang Pendidikan	Jumlah
S3	0
S2	39
S1/D4	111
Sarjana Muda/D3	6
D1	0
SLTA/SMK	2
SLTP	0
SD	0
Jumlah Total	158

2. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau memiliki alokasi anggaran sebesar Rp30.302.311.000,00 dengan target 369 output dan telah terealisasi sebesar Rp30.244.202.123,00 dengan 372 output.

E. Isu-Isu Strategis

Secara umum, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Riau sudah baik, hal ini tercermin dari 13 entitas, 11 entitas sudah mendapat opini WTP, satu entitas mendapat opini WTP-PSH dan satu entitas mendapat opini TMP atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2023, yaitu pada pemeriksaan Semester I Tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat hal-hal strategis yang masih perlu dibenahi oleh pemerintah daerah, seperti pengelolaan dan pencatatan aset serta pengelolaan belanja modal.

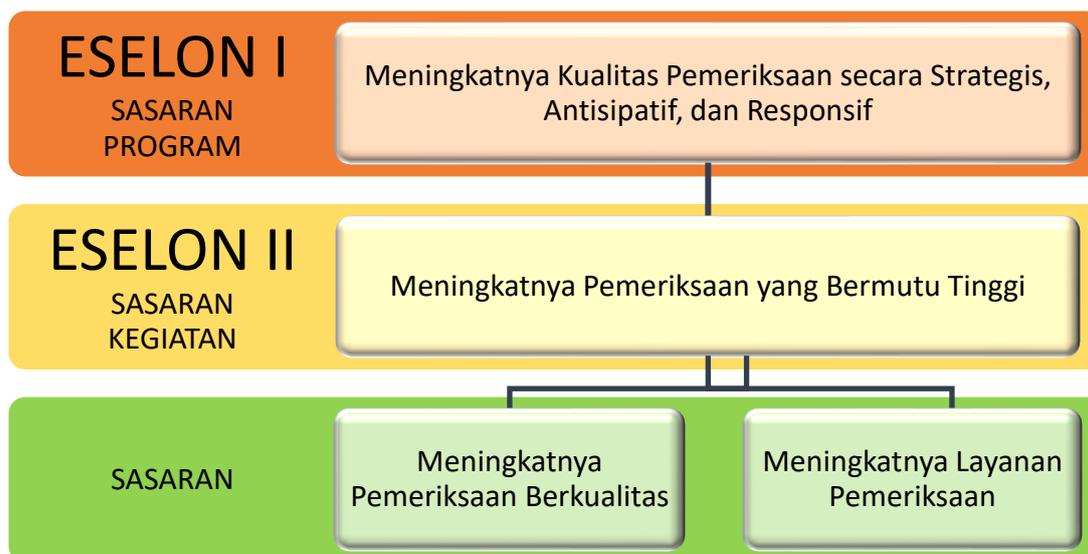
Terkait hubungan dengan pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Riau senantiasa terbuka menerima kunjungan dari berbagai pihak seperti pers, LSM, mahasiswa, pelajar sekolah, maupun instansi pemerintah lainnya diluar entitas pemeriksaan. Dalam hal keterbukaan informasi publik, BPK Perwakilan Provinsi Riau terbuka untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diterbitkan kepada masyarakat yang mengajukan permintaan informasi publik dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BPK perwakilan Provinsi Riau juga telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Adapun terkait peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kegiatan, secara bertahap akan dipenuhi sesuai dengan ketersediaan anggaran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

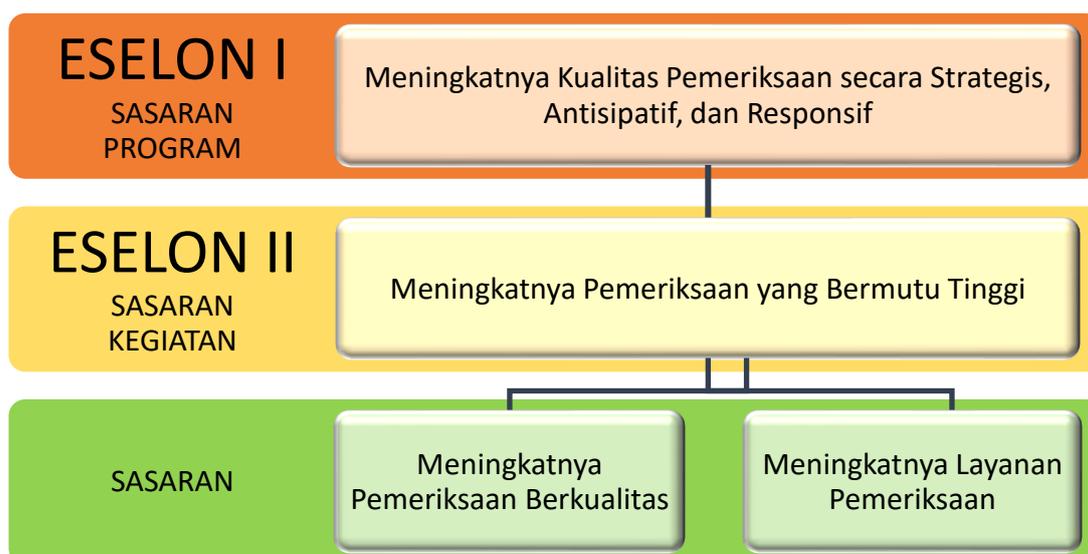
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Riau

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V sebagai pelaksana sebagian tugas dan wewenang BPK di bidang pemeriksaan, telah menetapkan Sasaran Program Eselon I yang digambarkan dalam bentuk peta strategi sebagai berikut:



Gambar 2.1 - Peta Strategi AKN V

Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program AKN V dapat digambarkan dalam peta strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau sebagai berikut:



Gambar 2.2 - Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Riau

Visi

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Misi

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
- b. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

B. Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau

I. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau selaku pimpinan satuan kerja dan Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V selaku atasan pimpinan satuan kerja. Strategi, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 – Indikator Kinerja Utama (IKU)
BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja Utama		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi: <ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%

	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

II. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

BPK Perwakilan Provinsi Riau berdasarkan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 93/ND/XVIII.PEK/04/2024 tanggal 17 April 2024 telah menyampaikan dokumen rencana aksi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Rencana aksi dibuat untuk mendukung pencapaian setiap indikator kinerja. Rencana aksi atas target dibuat per triwulan sesuai dengan permintaan laporan kinerja triwulan.

Rencana aksi yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Riau, pada setiap indikator kinerja secara umum diantaranya:

- a. Meningkatkan QC dan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2024 dan koordinasi dengan EPP atas hasil evaluasi LHP;
- c. Menyusun rencana pemeriksaan sesuai dengan tematik nasional pemeriksaan yang ditetapkan BPK dan memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan Tematik Nasional;
- d. Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan; dan
- e. Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau menunjukkan bahwa Nilai AKIP BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebesar **88,00** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Tidak ada penurunan atau kenaikan dari Nilai AKIP Tahun 2023.

Uraian hasil evaluasi atas penilaian mandiri AKIP Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

a. Perencanaan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memenuhi kriteria pada komponen Perencanaan Kinerja secara optimal dengan upaya sebagai berikut.

- 1) secara rutin melakukan evaluasi atas indikator dan target kinerja;
- 2) telah menyusun perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, dengan indikator SMART, serta *cascading* sampai dengan level individu; dan
- 3) telah menggunakan aplikasi Proses RKA dalam penyusunan anggaran dan proses penelitian anggaran.

b. Pengukuran Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memenuhi kriteria pada komponen Pengukuran Kinerja secara optimal dengan upaya pemanfaatan portal kolaborasi untuk penyampaian data/dokumen dan penggunaan aplikasi PRISMA untuk pengukuran kinerja yang dimonitor secara triwulanan.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Riau juga telah melakukan upaya inovatif yaitu "*Penyusunan Instruksi Kerja mengenai Tata Cara Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak di Lingkungan Perwakilan Provinsi Riau*" yang layak menjadi percontohan dan diakui oleh Direktorat PSMK sebagai capaian Indikator Kinerja (IK) Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan melalui Nota Dinas No. 19/ND/XII.1/01/2024 tanggal 8 Januari 2024.

c. Pelaporan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Riau belum memenuhi kriteria pada komponen Pelaporan Kinerja secara optimal yaitu LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2023 belum sepenuhnya menyajikan seluruh informasi terkait upaya nyata pencapaian target kinerja dan/atau hambatannya pada setiap target IKU. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memanfaatkan revidi LAKIN untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan tahun berikutnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

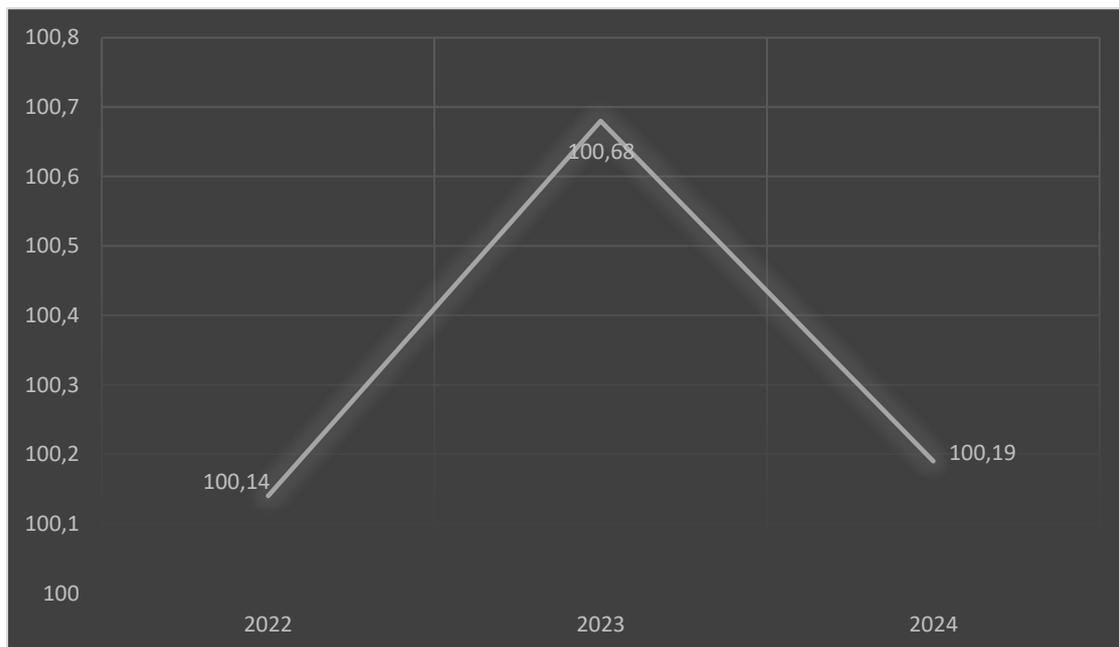
BPK Perwakilan Provinsi Riau belum memenuhi kriteria pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara optimal yaitu belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Namun demikian, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan sumber daya yang memadai.

BPK Perwakilan Provinsi Riau juga senantiasa berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan, diantaranya:

- a. Melakukan analisis permasalahan pada Hasil Evaluasi AKIP tahun sebelumnya;
- b. Adanya dukungan dan komitmen dari manajemen serta pengelola kinerja di Perwakilan Provinsi Riau;
- c. Komunikasi intensif dengan Itama terkait hal-hal yang memerlukan perbaikan;
- d. Meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN Tahun 2024 dengan menambahkan informasi:
 - 1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - 2) Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - 3) Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja (tidak hanya efisiensi keuangan); dan
 - 4) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau

BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan tugas dan fungsinya yang mendukung pengukuran capaian kinerja BPK. Pada Tahun 2024, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau sebesar **100,19**. Skor tersebut mengalami **penurunan** apabila dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar **100,68**. Skor capaian kinerja selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Tren Kinerja Selama 3 Tahun

BPK Perwakilan Provinsi Riau pada Tahun 2024 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **100,19**. Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau tersebut didasarkan pada 13 indikator kinerja dimana tujuh IK melebihi target, tiga IK sesuai target, dan tiga IK belum sesuai target. Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun 2024			
		Target	Realisasi	Skor	Capaian
Skor Kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024: 100,19					
Sasaran Kegiatan - Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi					
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83,38%	83,38	Dibawah Target
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00%	100,00	Sesuai Target
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	79,17%	105,00	Melebihi Target
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,38%	100,38	Melebihi Target
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100,00%	100,00	Sesuai Target
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,23%	101,23	Melebihi Target
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,88	101,46	Melebihi Target
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	88,00	97,72	Dibawah Target
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	94,67%	96,60	Dibawah Target
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	104,76%	104,76	Melebihi Target
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,31	105,00	Melebihi Target
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100,00	Sesuai Target
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	92,46%	105,00	Melebihi Target

Adapun perbandingan capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau antara realisasi tahun 2024 dengan realisasi selama tiga tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Selama Tiga Tahun

Indikator Kinerja	2024		2023		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKU 1	100%	83,38%	100%	90,77%	100%	89,29%
IKU 2	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%

IKU 3	75%	79,17%	75%	79,83%	75%	82,48%
IKU 4	100%	100,38%	100%	102,25%	100%	100%
IKU 5	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	100%	101,23%	100%	100,24%	100%	100%
IKU 7	4,81	4,88	5,00	4,80	5,00	4,86
IKU 8	90,05	88,00	89,00	88,00	88,00	90,44
IKU 9	98%	94,67%	98%	97,43%	97%	95,25%
IKU 10	100%	104,76%	100%	110%	100%	100%
IKU 11	3,80	4,31	3,90	4,07	3,80	4,12
IKU 12	100%	100,00%	100%	98,6%	100%	100%
IKU 13	84,50%	92,46%	88,50%	90,40%	88%	89,60%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahunan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahunan

Indikator Kinerja	Target					Realisasi Tahun 2024	Skor Tahun 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	100%	100%	100%	100%	100%	83,38%	83,38
IKU 2	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00
IKU 3	75%	75%	75%	75%	75%	79,17%	105,00
IKU 4	100%	100%	100%	100%	100%	100,38%	100,38
IKU 5	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00
IKU 6	100%	100%	100%	100%	100%	101,23%	101,23
IKU 7	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81	4,88	101,46
IKU 8	86,00	87,00	88,00	89,00	90,05	88,00	97,72
IKU 9	95%	96%	97%	98%	98%	94,67%	96,60
IKU 10	100%	100%	100%	100%	100%	104,76%	104,76
IKU 11	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,31	105,00
IKU 12	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00
IKU 13	87%	87,5%	88%	88,5%	84,5%	92,46%	105,00

1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Capaian tersebut diukur berdasarkan dokumen pendukung berupa:

- a. QA dan QC yang telah diperoleh dan telah ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Kepala Sub Auditorat serta Kepala Perwakilan; dan

- b. Hasil Evaluasi EPP yang merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Capaian IKU 1 - Tahun 2024
Target 2024: 100%
Capaian Tahun 2024: 83,38% (Dibawah Target)
<p>Catatan:</p> <p>Pada Tahun 2024, sudah diterbitkan LHP LKPD untuk 13 entitas dan dokumen pendukung berupa QA dan QC telah diperoleh dan telah ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Kepala Sub Auditorat serta Kepala Perwakilan.</p> <p>Hasil Evaluasi EPP melalui ND Kepala Direktorat PSMK Nomor 55/ND/XII.1/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Penyampaian Data Hasil Evaluasi LHP oleh Direktorat EPP berdasarkan Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Penyusunan IHPS Tahun 2024, diketahui bahwa: 1) Tingkat Konsistensi atas LHP sebesar 30,77%; dan 2) Tingkat akurasi atas LHP sebesar 100,00%.</p> <p>Dari hasil tersebut, ketidakcapaian IKU 1 disebabkan oleh hasil evaluasi EPP atas tingkat konsistensi LHP yang belum mencapai nilai 100%.</p>

Tabel 3.4 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	78,85%	95,00%	89,29%	90,77%	83,38%
Capaian	78,85	95,00	89,29	90,77	83,38
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	78,85%	95,00%	89,29%	90,77%	83,38%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen seluruh tim pemeriksa untuk melengkapi dokumen lembar reviu; 2. Memastikan keakuratan penyajian pada LHP yang disusun; 3. Memperoleh dokumen pendukung berupa QA dan QC yang telah ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Kepala Sub Auditorat serta Kepala Perwakilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan konsistensi penyajian atas LHP yang disusun; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiAP dalam mendokumentasikan setiap tahapan pemeriksaan atau program kerja perorangan pada pemeriksaan periode berikutnya sampai dilakukan proses reviu secara berjenjang oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa (PFP).

2. IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) **Kinerja dan DTT** yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Capaian IKU 2 - Tahun 2024
Target 2024: 100%
Capaian Tahun 2024: 100% (Sesuai Target)
Catatan: Pada Tahun 2024, realisasi atas IKU 2 sebesar 100% dari target 100% sehingga skor capaiannya sebesar 100. Hal ini mengindikasikan bahwa simpulan yang tersaji pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah sesuai dengan Harapan Penugasan pada Program Pemeriksaan (P2).

Tabel 3.5 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 2 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
1. Peningkatan, pengecekan, pengawasan dan perbaikan pada P2 baik dari tahap Ketua Tim Pemeriksa hingga Kepala Perwakilan sebelum pemeriksaan dilaksanakan agar kesesuaian harapan penugasan tujuan pemeriksaan dan simpulan dapat sejalan dengan visi dan misi BPK.	1. Rapat koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2025 dengan memperhatikan Renstra BPK dan Kebijakan AKN V; 2. Pemberi Tugas Pemeriksaan menyatakan secara tertulis dan jelas Harapan Penugasan Pemeriksaan yang dituangkan dalam P2; 3. Pengendali Teknis meningkatkan reviu kesesuaian P2 dengan Harapan Penugasan

3. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Capaian IKU 3 - Tahun 2024
Target 2024: 75%
Capaian Tahun 2024: 79,17% (Melebihi Target)
Catatan: Perhitungan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ini sebagaimana yang dimuat dalam IHPS I Tahun 2024. Penyerapan anggaran terkait IKU 3 tidak terlepas dari anggaran komponen melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan hingga menjadi <i>output</i> berupa laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Berikut perbandingan capaian IKU 3 selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.6 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 3 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	79,41%	80,51%	82,48%	79,83%	79,17%
Capaian	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	105,88%	107,35%	109,97%	104,94%	105,56%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
<ol style="list-style-type: none"> Komitmen untuk meningkatkan pemantauan pelaksanaan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK oleh entitas melalui aplikasi SIPTL; Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi / Kota / Kabupaten. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kesulitan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebelumnya; Inventarisasi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti dan melakukan analisis; dan Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL).

4. IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Capaian IKU 4 - Tahun 2024
Target 2024: 100%
Capaian Tahun 2024: 100,38% (Melebihi Target)
Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Sumber data yang digunakan untuk pengukuran IKU ini adalah LHP Pemeriksaan Tematik dan RKP Pemeriksaan.

Tabel 3.7 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 4 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,61%	100,92%	100,00%	102,25%	100,38%
Capaian	100,61	100,92	100,00	102,25	100,38
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100,61%	100,92%	100,00%	102,25%	100,38%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
<ol style="list-style-type: none"> Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi pemeriksaan tematik nasional dan memastikan ketersediaan anggaran dan personil di perwakilan; Menyusun tim pemeriksaan tematik nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> Terus ikut dan berperan aktif dalam setiap kegiatan rapat koordinasi pemeriksaan tematik nasional yang diadakan oleh pihak-pihak terkait; Mendukung penuh program-program pemeriksaan nasional dalam bentuk perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pemeriksaan.

5. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Sumber data yang digunakan sebagai pengukuran yaitu Surat Permintaan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan, Surat Tugas Pemeriksaan, LHP, dan Surat Keluar Penyampaian LHP.

Capaian IKU 5 - Tahun 2024
Target 2024: 100%
Capaian Tahun 2024: 100% (Sesuai Target)
Catatan: Standar penilaian IKU 5 adalah apabila ada permintaan perhitungan kerugian daerah/negara dari pemangku kepentingan.

Tabel 3.8 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 5 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	101,00%	100,00%
Capaian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100,00%	100,00%	100,00%	101,00%	100,00%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
1. Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.	1. Mengelola permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan khususnya terkait permintaan pemeriksaan investigasi dalam satu unit kerja Eselon I.

Diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus mempertahankan hingga tahun-tahun berikutnya. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan terus berusaha berkontribusi atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

6. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan **minimal satu kali** dalam periode Renstra.

Capaian IKU 6 - Tahun 2024
Target 2024: 100%
Capaian Tahun 2024: 101,23% (Melebihi Target)
Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 3.9 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 6 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,40%	100,00%	100,24%	101,23%
Capaian	100,00	100,40	100,00	100,24	101,23
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100,00%	100,40%	100,00%	100,24%	101,23%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
<ol style="list-style-type: none"> Keikutsertaan mengikuti rapat koordinasi dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) pemeriksaan tematik lokal; Memastikan ketersediaan anggaran dan personil di perwakilan; Menyusun tim pemeriksaan tematik lokal; dan Upaya BPK Perwakilan Provinsi Riau untuk menyesuaikan tema pemeriksaan dengan isu-isu strategis di daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Terus ikut dan berperan aktif dalam setiap kegiatan rapat koordinasi dan FGD pemeriksaan tematik lokal yang diadakan oleh pihak-pihak terkait; Komitmen untuk terus bersikap responsif atas isu kekinian di wilayah kerja Provinsi Riau.

7. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi, misi, dan nilai dasar BPK.

Capaian IKU 7 – Tahun 2024
Target 2024: 4,81
Capaian Tahun 2024: 4,88 (Melebihi Target)
<p>Catatan:</p> <p>Indeks implementasi nilai dasar BPK diperoleh berdasarkan <i>self assessment</i> pegawai BPK di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan BPK Wilayah Barat dan Timur.</p> <p>Indeks hasil survei pada Tahun 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin atau sebesar 2,53% jika dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2023.</p> <p>Peningkatan indeks secara total ini karena di semua wilayah survei mengalami peningkatan yang baik, yaitu Kantor Pusat BPK (2,80%), Perwakilan BPK Wilayah Timur (2,58%), dan Perwakilan BPK Wilayah Barat (2,46%).</p>

Tabel 3.10 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 7 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81
Realisasi	4,36	4,51	4,86	4,80	4,88
Capaian	87,20	90,20	97,20	96,00	101,46
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	87,20%	90,20%	97,20%	96,00%	101,46%

Secara total, pegawai BPK yang disurvei memberikan penilaian terhadap Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK sebesar 4,82. Indeks ini sudah termasuk dalam kategori “**Sangat Baik**” atas nilai dasar BPK, artinya pegawai BPK yang disurvei telah sangat menerapkan/mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK di dalam pekerjaannya.

Hal tersebut dapat tercermin dari nilai indeks di semua wilayah survei di atas nilai 4,00, yaitu Kantor Pusat BPK memperoleh indeks tertinggi sebesar 4,83, Perwakilan BPK Wilayah Barat memperoleh indeks sebesar 4,82, sedangkan Perwakilan BPK Wilayah Timur memperoleh indeks yang hampir sama dengan Kantor Pusat, yaitu sebesar 4,83.

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
1. Adanya beberapa pegawai BPK yang terjaring OTT dan didakwa atas tindak pidana korupsi pada Tahun 2023 membuat BPK secara keseluruhan berbenah secara masif seperti melakukan sosialisasi atas nilai-nilai dasar BPK kepada seluruh pegawai BPK pada tahun 2024.	1. Perlu diadakan sosialisasi kembali terkait definisi dan penerapan Nilai Dasar BPK untuk menyamakan persepsi seluruh pegawai di BPK Provinsi Riau; 2. Perlu dilakukan pembekalan kembali terkait definisi dan penerapan integritas, independensi, dan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan pada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau.

8. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

AA	= Sangat Memuaskan (>90-100)
A	= Memuaskan (>80-90)
BB	= Sangat Baik (>70-80)
B	= Baik (>60-70)
CC	= Cukup (>50-60)
C	= Kurang (>30-50)
D	= Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Sumber data pengukuran yang digunakan adalah evaluasi AKIP dari Inspektur Utama (Itama).

Capaian IKU 8 - Tahun 2024
Target 2024: 90,05
Capaian Tahun 2024: 88,00 (Dibawah Target)
<p>Catatan:</p> <p>Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau, ketidakcapaian target pada IKU 8 ini disebabkan oleh LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2023 belum sepenuhnya menyajikan seluruh informasi terkait upaya nyata pencapaian target kinerja dan/atau hambatannya pada setiap target IKU dan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.</p>

Tabel 3.11 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 8 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	86,00	87,00	88,00	89,00	90,05
Realisasi	87,43	86,90	90,44	88,00	88,00
Capaian	101,66	99,89	102,77	98,88	97,72
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	98,23%	97,64%	101,61%	98,87%	97,72%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
<ol style="list-style-type: none"> Secara rutin melakukan evaluasi atas indikator dan target kinerja; Telah menyusun perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, dengan indikator SMART, serta <i>cascading</i> sampai dengan level individu; dan Telah menggunakan aplikasi Proses RKA dalam penyusunan anggaran dan proses penelitian anggaran. 	<ol style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti rekomendasi Utama berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2024 untuk penyusunan LAKIN Tahun 2025.

9. IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytics*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Capaian IKU 9 – Tahun 2024
Target 2024: 98%
Capaian Tahun 2024: 94,67% (Dibawah Target)
<p>Catatan:</p> <p>Sumber data untuk IKU 9 didapatkan dari aplikasi BIDICS per 26 Januari 2025. Ketidacapaian IKU 9 atas target yang telah ditetapkan disebabkan oleh masih belum optimalnya pemanfaatan TI pada dua komponen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> SISDM: 89,46%; dan SiAP: 83,91%

Tabel 3.12 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 9 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	98,00%
Realisasi	99,14%	99,14%	95,25%	97,43%	94,67%
Capaian	104,36	103,27	98,20	99,42	96,60
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	101,36%	101,36%	97,19%	99,42%	96,60%

Pada Tahun 2024, 89,46% pegawai BPK Perwakilan Provinsi Riau telah memanfaatkan SISDM, 100% pegawai memanfaatkan Jasmin, 100% pegawai memanfaatkan SMP, 83,91% pegawai memanfaatkan SiAP dan 100,00% pegawai telah memanfaatkan SiPTL. Sehingga tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Riau adalah sebesar 94,67%.

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
1. Para Kepala Subauditorat dan Kepala Sekretariat Perwakilan senantiasa mendorong para pegawai dibawahnya untuk memanfaatkan layanan teknologi dan informasi yang disediakan oleh Biro TI secara optimal.	1. Meningkatkan kesadaran pegawai dalam memanfaatkan layanan Teknologi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dengan melakukan sosialisasi, khususnya bidang pemeriksaan yang nilai pemanfaatan TI nya masih belum cukup tinggi.

10. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan (MP) dipandang sebagai upaya pemrolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reuiu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, *mentoring* sebagaimana tercantum pada

Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Capaian IKU 10 - Tahun 2024	
Target 2024: 100%	
Capaian Tahun 2024: 104,76% (Melebihi Target)	
Catatan: Capaian IKU 10 telah melebihi target yang ditetapkan karena dari empat jenis aktivitas MP yang direncanakan untuk dilaksanakan, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melaksanakan enam jenis aktivitas MP dari total sembilan jumlah aktivitas MP. Selain itu, telah pula diakui satu usulan <i>Best Practice</i> sebagai capaian indikator kinerja tahun 2024	

Tabel 3.13 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 10 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%	110,00%	104,76%
Capaian	100,00	100,00	100,00	105,00	104,76
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	100,00%	100,00%	100,00%	110,00%	104,76%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
1. Pelaksanaan sembilan jumlah Aktivitas MP yang telah dilakukan didukung dengan partisipasi seluruh pegawai dan dokumentasi yang memadai, dimana enam diantaranya diakui sebagai jenis aktivitas yang dilaksanakan; 2. Telah diakui satu usulan <i>Best Practice</i> sebagai capaian indikator kinerja Tahun 2024.	1. Peningkatan pemahaman atas Manajemen Pengetahuan dan <i>Best Practice</i> sesuai dengan Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK; 2. Menambah pelaksanaan Aktivitas MP sehingga mencapai target yang ditetapkan; 3. Mengusulkan Penerapan BP hingga mendapatkan Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK perihal Pengakuan Penerapan <i>Best Practice</i> sebagai Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.

11. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Capaian IKU 11 - Tahun 2024
Target 2024: 3,80
Capaian Tahun 2024: 4,31 (Melebihi Target)
Catatan: Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerjasama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK.

Tabel 3.14 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 11 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,66	3,99	4,12	4,07	4,31
Capaian	96,32	105,00	105,00	105,00	105,00
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	96,31%	105%	105%	105%	105%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
1. Optimalnya komunikasi yang terjalin antara BPK dengan <i>stakeholders</i> baik masyarakat, IPH, LSM, wartawan dan pemerintah daerah serta lembaga lainnya baik secara kunjungan maupun melalui program pemeriksaan.	1. Terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan <i>stakeholders</i> serta mengoptimalkan pelayanan pemeriksaan dan non-pemeriksaan dengan pihak luar dengan tetap menjaga nilai-nilai integritas, independensi dan profesionalisme.

12. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Sejak Tahun 2020, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara, antara lain melalui pengalihan pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring (*online*) melalui *e-learning* dan *Learning Management System* (LMS) sebagai penyesuaian selama kondisi pandemi COVID-19, memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas layanan kediklatan baik dari kualitas layanan sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran.

Selain itu juga dilakukan penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN); dan
- b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014).

Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah **40 JP setahun untuk pemeriksa** dan **20 JP setahun untuk non pemeriksa**.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah **30 September**. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Capaian IKU 12 - Tahun 2024	
Target 2024: 100%	
Capaian Tahun 2024: 100% (Sesuai Target)	
Catatan: Berdasarkan dokumen monitoring Diklat BPK Perwakilan Provinsi Riau per 31 Desember 2024, 158 dari total 158 pegawai telah memenuhi jam diklat minimal yang dipersyaratkan, sehingga IKU 12 telah mencapai target yang ditetapkan.	

Tabel 3.15 - Perbandingan Capaian Kinerja IKU 12 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	95,50%	100,00%	100,00%	98,69%	100,00%
Capaian	95,50	100,00	100,00	98,69	100,00
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	95,50%	100,00%	100,00%	98,69%	100,00%

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
1. Peran pro-aktif dari Subbagian SDM dalam melakukan monitoring pemenuhan jam diklat pegawai dengan mengikutsertakan seluruh pejabat fungsional dan pejabat struktural dalam Diklat Pemeriksaan Kinerja selama 20 jam pelajaran.	1. Secara berkala akan melakukan monitoring pemenuhan jam diklat; 2. Mengikutsertakan diklat secara daring bagi pemeriksa disela-sela waktu diluar kegiatan pemeriksaan; 3. Mendorong pegawai non-pemeriksa untuk ikut serta dalam diklat <i>self-learning</i> yang waktu pelaksanaannya dapat dilakukan secara fleksibel disela-sela kegiatan kantor.

13. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- c. Penyerapan anggaran;
- d. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- e. Pencapaian keluaran; dan
- f. Efisiensi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Capaian IKU 13 – Tahun 2024
Target 2024: 84,50%
Capaian Tahun 2024: 92,46% (Melebihi Target)
Catatan: Perhitungan berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Anggaran dari Biro Keuangan yang disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal. Tingkat Kinerja Anggaran yang telah cukup maksimal disebabkan tingginya persentase Pencapaian Keluaran dan Nilai Efisiensi dalam perhitungan Evaluasi Kinerja Anggaran.

Tabel 3.16 – Perbandingan Capaian Kinerja IKU 13 Selama Lima Tahun Terakhir

IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	84,50%
Realisasi	91,21%	90,76%	89,60%	90,40%	92,46%
Capaian	104,84	103,73	101,82	102,15	105,00
Persentase Realisasi Terhadap Target 2024	107,94%	107,41%	106,04%	106,98%	109,42%

Pada Triwulan IV Tahun 2024, IKU ini terealisasi sebesar 92,46%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar **85,00%**
Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal nomor 115/ND/X/01/2025 tanggal 22 Januari 2025;
- b. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar **99,91%**
Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal nomor 76/ND/X/01/2025 tanggal 16 Januari 2025.

Kegiatan/Upaya untuk memastikan tercapainya target kinerja	
Kegiatan/Upaya pada Tahun 2024	Kegiatan/Upaya untuk Tahun 2025
1. Meningkatkan kinerja implementasi anggaran melalui pengelolaan kegiatan dan penganggaran secara lebih efisien dan efektif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merealisasikan output dan anggaran yang belum terealisasi pada bulan berikutnya; 2. Melakukan revisi anggaran dan perubahan rencana keluaran/output; 3. Meningkatkan realisasi anggaran sesuai dengan target Triwulan yang telah ditargetkan disela-sela kegiatan kantor; 4. melakukan monitoring realisasi anggaran dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian dan meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, dan sumber daya manusia sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi
 1. Penggunaan aplikasi BPK diantaranya Jasmin, SiAP LK, dan SiPTL memberikan manfaat efisiensi diantaranya efisiensi anggaran untuk ATK, efisiensi waktu, dan kecepatan pelayanan;
 2. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* dan “microsoft 365” untuk melaksanakan komunikasi dengan *stakeholders* atau rapat-rapat internal dapat mengefisienkan anggaran makan dan minum.
- b. Pengelolaan BMN
 1. Adanya inovasi pemusnahan arsip, memberikan manfaat berupa efisiensi penggunaan ruangan arsip;
 2. Pemanfaatan fitur *file sharing* melalui jaringan internal BPK Perwakilan Provinsi Riau meminimalisir ruang penyimpanan arsip *hardcopy*.
- c. Efisiensi Penggunaan Anggaran
 1. Sisa anggaran pemeriksaan dialihkan untuk perjalanan dinas non-pemeriksaan;
 2. Penghapusan anggaran honorarium.
- d. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka efisiensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Riau sesuai dengan kewenangannya menggunakan pemeriksa di luar BPK (KAP) yang bekerja untuk/dan atas nama BPK. Hal ini berdampak pada optimalnya alokasi pemeriksa untuk tiap entitas pemeriksaan.

D. Perubahan Budaya Kerja

Melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 89/ND/XVIII.PEK/4/2024 tanggal 3 April 2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan Pemutakhiran Budaya Kerja yang diimplementasikan pada BPK Perwakilan Provinsi Riau. Nama Budaya Kerja BPK Riau adalah “**LANCANG KUNING**” yang merupakan singkatan dari Anda**LAN**, CANGgih, Te**KUN** Beribadah, dan Berdaya Sa**ING**”.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Implementasi Budaya Kerja pada Tahun 2023:

- a. Hambatan dan tantangan dalam implementasi Budaya Kerja

Hambatan: adanya dampak psikologis bagi pegawai dengan adanya kasus OTT Tim Pemeriksaan LKPD Kepulauan Meranti oleh KPK yang mengakibatkan motivasi pegawai mengalami penurunan dalam melaksanakan tugas.

Tantangan:

 1. Budaya kerja harus dengan konsisten selalu digunakan dan diimplementasikan oleh para pegawai, agar menyatu menjadi bagian dari identitas yang melekat di masing-masing pribadi;
 2. Mengembalikan semangat pegawai dengan adanya pengarahan dari pimpinan (seperti arahan dari Anggota 1 BPK RI);

3. Kegiatan konseling oleh ECC – Biro SDM pada saat pelaksanaan Program Komunitas Unggulan (PKU) yang diselenggarakan pada bulan Januari 2024
- b. Dampak/Perubahan yang terjadi dari pengembangan Budaya Kerja Pegawai BPK Riau kembali memiliki rasa semangat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan nilai dasar BPK dan budaya kerja “Lancang Kuning”.
- c. *Area of Improvement* / rencana pengembangan kegiatan Budaya Kerja Tahun 2024
 1. Sedang dilakukan renovasi sarana dan prasarana di ruang kerja pemeriksa untuk menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif serta modern sehingga meningkatkan motivasi dalam bekerja;
 2. Akan ada wacana dukungan pemeriksaan oleh staf TI dari Subbagian Umum dan TI;
 3. Akan dilakukan optimalisasi *sharing* perangkat TI di semua unit kerja;
 4. Akan dilakukan pengelolaan arsip terpusat di BPK Perwakilan Provinsi Riau;
 5. Menambah aktivitas di Ruang Komunitas Pegawai untuk meningkatkan kesehatan dan kebersamaan.

E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Riau memiliki alokasi anggaran sebesar Rp30.302.311.000,00 dengan target 369 output dan telah terealisasi sebesar Rp30.244.202.123,00 dengan 372 output.

F. Inovasi

Inovasi yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Riau dan telah diterima sebagai Usulan *Best Practice* adalah “***Dashboard BIDICS Pengelolaan Data Kepegawaian***”. Pengelolaan data kepegawaian menggunakan *Dashboard* BIDICS bertujuan untuk mengolah data kepegawaian di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau dan menyajikannya secara agregat dalam berbagai bentuk visualisasi, sehingga data tersebut menjadi informasi yang bernilai, bermanfaat, relevan, dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan dalam tata kelola kepegawaian. Informasi tersebut dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memahami data berdasarkan konteks dalam rangka memandu pengambilan keputusan berbasis data.

Dengan pemanfaatan *Dashboard* BIDICS, pemerolehan informasi terkait data kepegawaian BPK Perwakilan Provinsi Riau menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Informasi yang diperlukan oleh pengguna dapat dengan mudah dimodifikasi dan disaring (*filter*) untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. Secara umum, perbandingan sebelum dan sesudah pemanfaatan *Dashboard* BIDICS Kepegawaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17 – Perbandingan Perubahan Pelaksanaan Praktik

No	Uraian	Sebelum <i>Dashboard</i> BIDICS	Setelah <i>Dashboard</i> BIDICS
1	Data <i>agregat</i> kepegawaian	Diperoleh secara manual sesuai permintaan	Diperoleh secara daring
2	Format data	<i>Spreadsheet</i>	Berbasis <i>Web</i>
3	Fleksibilitas data	Rendah	Tinggi

No	Uraian	Sebelum <i>Dashboard BIDICS</i>	Setelah <i>Dashboard BIDICS</i>
4	Data visual	Tidak tersedia	Disajikan dalam berbagai bentuk bagan
5	Aksesibilitas	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)
6	Waktu perolehan data	Perlu waktu untuk menyiapkan data sesuai permintaan	Data yang diperoleh secara cepat dengan modifikasi dan <i>filter</i>
7	Keamanan data	Dapat dibuka siapa saja yang mendapatkan <i>file</i>	Akses terbatas untuk pengguna tertentu

G. Penghargaan

Penghargaan-penghargaan yang diraih oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau selama Tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 14/ND/XVIII.PEK/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Penyampaian Data Penghargaan Internal dan Eksternal yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Riau pada Tahun 2024 adalah:

1. Terbaik Kedua atas Pengelolaan Database Peraturan BPK Tahun 2023 dari Ditama Binbangkum BPK RI;
2. Zona Hijau atas Pengelolaan Unit Jaringan Dokumentasi dan Informas Hukum dan Informasi Hukum Tahun 2024 dari Ditama Binbangkum BPK RI;
3. Badan Publik Informatif kategori Instansi Vertikal pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi KI Riau Award 2024 dari Komisi Informasi (KI) Riau; dan
4. Terbaik II atas Satuan Kerja dengan BMN Lebih dari 500 NUP Kategori Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2023 dari KPKNL Pekanbaru.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Riau mengalami penurunan dalam pencapaian skor kinerja, yaitu 100,68 pada Tahun 2023 turun menjadi 100,19 pada Tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh belum tercapainya target atas tiga IKU pada Tahun 2024 ini.

Pada periode pengukuran kinerja Tahun 2025, diharapkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat semakin ditingkatkan melalui pengelolaan jadwal yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pemeriksaan maupun di bidang kesekretariatan, sehingga *output* kinerja yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan optimal, efektif, tepat waktu dan efisien.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024 ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kinerja dan pemanfaatan anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Riau

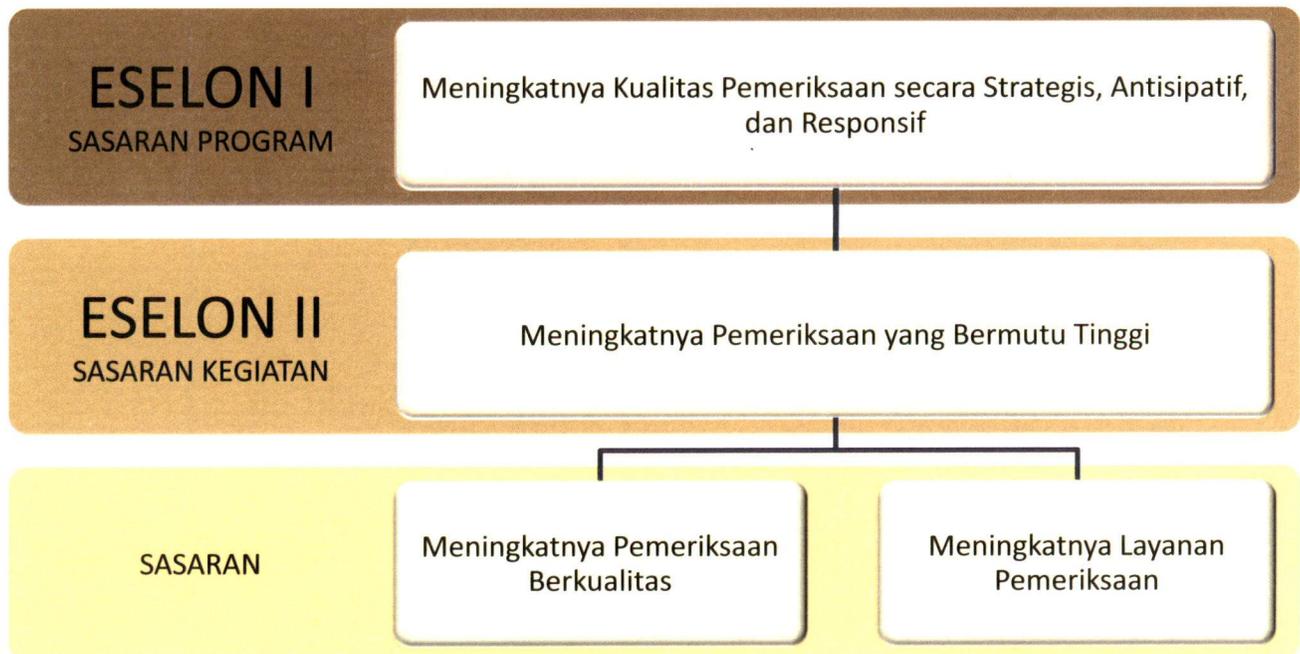
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFrA., ERMCP.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp30.579.049.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	Rp11.618.792.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	Rp18.960.257.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,

Dr. Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFA., ERMCP.

Pihak Pertama,

Jariyatna, S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA.



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

SATUAN KERJA PEMILIK RISIKO
BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pada Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Riau, Saya menyatakan bahwa:

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan konteks, profil dan peta risiko, serta penanganan risiko pada level Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Riau.
2. Pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Rencana aksi penanganan risiko dilaksanakan oleh seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, Saya berkomitmen melaksanakan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.

Jakarta, Januari 2024

Tortama KN V,

**Dr. Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak.,
CSFA., CPA., CFrA., ERMCP.**

Kepala Perwakilan Provinsi Riau

**Jariyatna S.E., M.M., Ak., CPA., CPSAK.,
CSFA.**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Riau
Tahun : 2024

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> N/A <p>Februari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di Februari setiap penugasan. Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di Maret setiap penugasan. Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>April:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di April setiap penugasan. Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>Mei:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di Mei setiap penugasan. Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di Juni setiap penugasan. Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di Juli setiap penugasan. • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. • Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>Agustus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; • Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di Agustus setiap penugasan. • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. • Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; • Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di September setiap penugasan. • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. • Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>Oktober:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; • Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. • Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di Oktober setiap penugasan. • Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. • Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>November:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di November setiap penugasan. Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik. <p>Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan QC oleh KT, PT dan PJ/WPJ melalui lapming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi; Melaksanakan QA oleh Kalan dan Kasubaud melalui lapduming dan diskusi, serta grup untuk saling koordinasi. Meningkatkan QC mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh KT, PT, dan PJ di Desember setiap penugasan. Meningkatkan QA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat, Kepala Auditorat, dan Auditor Utama. Mewajibkan Tim Pemeriksa untuk menyusun KKP sesuai petunjuk pelaksanaan KKP dengan menyimpan secara elektronik.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2024; dan Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP. <p>Februari:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p> <p>Maret:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p> <p>April:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p> <p>Mei:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p> <p>Juni:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p> <p>Juli:</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Agustus: Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p> <p>September: Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p> <p>Oktober: Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p> <p>November: Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p> <p>Desember: Melaksanakan koordinasi dengan EPP atas Hasil evaluasi LHP.</p>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. • Mendorong entitas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>Februari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. • Mendorong entitas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester I. • Mendorong entitas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
								<p>April: Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester I dengan mengundang entitas dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengisian SIPTL.</p> <p>Mei: Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester I dengan mengundang entitas dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengisian SIPTL.</p> <p>Juni: Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester I dengan mengundang entitas dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengisian SIPTL.</p> <p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II. • Mendorong entitas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Agustus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II. Mendorong entitas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan bahan dalam rangka pemuktahiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk Semester II. Mendorong entitas menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>Oktober:</p> <p>Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II dengan mengundang entitas dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengisian SIPTL.</p> <p>November:</p> <p>Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II dengan mengundang entitas dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengisian SIPTL.</p> <p>Desember:</p> <p>Pelaksanaan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II dengan mengundang entitas dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengisian SIPTL.</p>
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana pemeriksaan sesuai dengan Tematik Nasional Pemeriksaan yang ditetapkan BPK; dan Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan Tematik Nasional <p>Juni:</p> <p>Penyusunan Kajian dan KAK Pemeriksaan sesuai dengan <i>strategic paper</i> pemeriksaan</p> <p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti FGD pemeriksaan kinerja/DTT; Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja/DTT untuk mendukung pemeriksaan terinci. <p>Agustus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti FGD pemeriksaan kinerja/DTT; Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja/DTT untuk mendukung pemeriksaan terinci. <p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti FGD pemeriksaan kinerja/DTT; Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja/DTT untuk mendukung pemeriksaan terinci. <p>Oktober:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti FGD pemeriksaan kinerja/DTT; Melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja/DTT.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								November: <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti FGD pemeriksaan kinerja/DTT; Melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja/DTT. Desember: <ul style="list-style-type: none"> Mengikuti FGD pemeriksaan kinerja/DTT; Melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja/DTT.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Januari: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Februari: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Maret: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. April: <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Mei:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Agustus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Oktober:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>November:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. <p>Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Menunggu permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan; Melaksanakan pemeriksaan yang diperintahkan Badan guna memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan jika ada; dan Mengalokasikan tenaga pemeriksa yang memadai untuk berkontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana pemeriksaan Tematik Lokal; Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan Tematik Lokal; dan Korrdinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan Tematik Lokal. <p>Juli:</p> <p>Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja/DTT untuk mendukung pemeriksaan terinci.</p> <p>Agustus:</p> <p>Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja/DTT untuk mendukung pemeriksaan terinci.</p> <p>September:</p> <p>Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan kinerja/DTT untuk mendukung pemeriksaan terinci.</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Oktober: Melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja/DTT.</p> <p>November: Melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja/DTT.</p> <p>Desember: Melaksanakan pemeriksaan terinci kinerja/DTT.</p>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4.81)	-	-	-	Sangat Memuaskan (4.81)	Desember	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan; Minitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut-turut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. <p>Februari: Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</p> <p>Maret: Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</p> <p>April: Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</p> <p>Mei: Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</p> <p>Juni: Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</p> <p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan; Minitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut-turut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan Kinerja/DTT; Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan. <p>Agustus: Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahannya pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>September: Sosialisasi terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar, serta Kode Etik BPK dalam pengarahan pimpinan maupun rapat-rapat yang dilaksanakan.</p> <p>Oktober: Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK.</p> <p>November: Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK.</p> <p>Desember: Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi Nilai Dasar BPK.</p>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)	-	-	-	AA (90,05)	Desember	<p>Oktober: Menyusun Laporan Akuntabilitas AKN Tahun 2024</p> <p>November: Menyusun Laporan Akuntabilitas AKN Tahun 2024</p> <p>Desember: Menyusun Laporan Akuntabilitas AKN Tahun 2024</p>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	65%	75%	98%	Desember	<p>Januari: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>Februari: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>Maret: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>April: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>Mei: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>Juni: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>Juli: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>Agustus: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>September: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>Oktober: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>November: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p> <p>Desember: Mendorong dan melaksanakan pemanfaatan layanan TI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai baik dalam pemeriksaan maupun nonpemeriksaan. (Seperti memaksimalkan aplikasi persuratan JASMIN, Sisdm, SiAP LK, SiAP Banparpol, dll).</p>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	50%	75%	100%	Desember	<p>Triwulan I (Januari, Februari, Maret):</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan Diklat untuk persiapan pemeriksaan LKPD; Melakukan kegiatan Mentoring dalam rangka memfasilitasi anak magang / PKL yang memasuki pekerjaan baru untuk mempercepat adaptasi dan pemahaman pada sebuah bidang pekerjaan;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja selama pemeriksaan yang dapat dijadikan sebagai <i>Best Practice</i> selama pemeriksaan. <p>Triwulan II (April, Mei, Juni):</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan Bantuan Rekan Sejawat (<i>Peer Assist</i>) yang dilaksanakan sebagai media transfer pengetahuan dan pengalaman dengan mengundang tim.rekan sejawat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan sebelum pemeriksaan dilakukan; Melaksanakan kegiatan Wawancara Berbasis Pengetahuan (<i>Knowledge-based Interview</i>) untuk menangkap pengetahuan dari pegawai yang akan keluar, khususnya terkait dengan pengalaman pekerjaan yang selama ini ditanganinya. <p>Triwulan III (Juli, Agustus, September):</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan Mentoring dalam rangka memfasilitasi anak magang / PKL yang memasuki pekerjaan baru untuk mempercepat adaptasi dan pemahaman pada sebuah bidang pekerjaan; Melaksanakan Kegiatan Diklat untuk persiapan pemeriksaan Kinerja/DTT. <p>Triwulan IV (Oktober, November, Desember):</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan Forum Berbagi Pengetahuan, yaitu kegiatan Diseminasi Pengetahuan dari Pegawai BPK yang telah selesai mengikuti pendidikan sekolah, kursus singkat, dan pelatihan; Menyusun serta menyampaikan usulan <i>Best Practice</i> kepada Ditama Renvaja. Untuk usulan <i>Best Practice</i> yang telah divalidasi dan disahkan, dapat diterapkan implementasinya, serta dilakukan sharing knowledge pada pihak lain.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>Februari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>April:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> • Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>Mei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>Agustus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>Oktober:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. <p>November:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan;

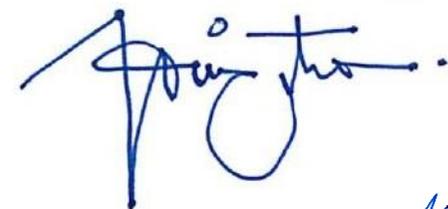
Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>. Desember: <ul style="list-style-type: none"> Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat Pakta Integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan <i>Whistleblower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i> melalui <i>Website</i>.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	25%	50%	75%	100%	Desember	Januari: <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Februari: <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Maret: <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. April: <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Mei: <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. <p>Juni:</p> <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. <p>Juli:</p> <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. <p>Agustus:</p> <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. <p>September:</p> <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. <p>Oktober:</p> <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>November:</p> <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. <p>Desember:</p> <p>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai dan menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat dan topik pengembangan kompetensi pegawai:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi pemeriksa minimal 80 jam pelajaran dalam 2 tahun atau 40 jam pelajaran dalam I tahun. Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan mengikuti pelatihan bagi non-pemeriksa minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84.50%	84.50%	84.50%	84.50%	84.50%	Desember	<p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA 2024 dan Kebijakan TA 2024; Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan. <p>Februari:</p> <p>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan.</p> <p>Maret:</p> <p>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan.</p> <p>April:</p> <p>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan.</p> <p>Mei:</p> <p>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan.</p> <p>Juni:</p> <p>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan.</p> <p>Juli:</p> <p>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan.</p> <p>Agustus:</p> <p>Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan.</p>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								September: Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan. Oktober: Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan. November: Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan. Desember: <ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan atas pelaksanaan realisasi anggaran melalui laporan bulanan; Menyusun data capaian output.

**KEPALA PERWAKILAN
BPK PROVINSI RIAU**



Jariyatna

NIP 197001311996031003



**BERITA ACARA VALIDASI
VALIDASI DATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024**

SATKER : BPK Perwakilan Provinsi Riau

NAMA IKU	SEBELUM VALIDASI (Data pada periode penginputan s.d tgl 15 Januari 2025)		SETELAH VALIDASI (HASIL KOREKSI)		CATATAN	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	40,00%	100%	83,38%	
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	80,17%	75%	79,17%	Perhitungan TLRHP ini sebagaimana yang dimuat dalam IHPS I 2024.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100,38%	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100,00%	
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	101,23%	
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,82	4,81	4,88	
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	88,00	90,05	88,00	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	91,87%	98%	94,67%	Data Bidics per 26 Januari 2025
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,0%	104,79%	100,0%	104,76%	
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,10	3,80	4,31	
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100%	100,00%	158 dari 158 pegawai telah memenuhi jam diklat.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	84,73%	84,50%	92,46%	

Jakarta, Januari 2025

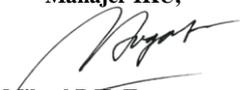
Kepala Seksi MAKIN I,


Sonia Moekarjono Puteri
NIP 198005252007082001

LO PSMK,


Atika Paramita
NIP 198403102008082001

Manajer IKU,


Mikael P.H. Togatorop
NIP 197112091999031003

Inputer IKU,


Dian Anugrah
NIP 198910012019032015

Inputer IKU,


Ayu Dia Ramadhani
NIP 199602112019032017